

OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON-KAYU (HHNK) DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) BERBASIS GREEN ISLAMIC ECONOMY DI ACEH (STUDI KASUS: HAKA)

Zul Ikram¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Intan Qurratulaini²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Husnul Mirzal³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: ¹220602015@student.ar-raniry.ac.id, ²intan.qurratulaini@ar-raniry.ac.id, ³husnul.mirzal@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The utilization of non-timber forest products (NTFPs) in Aceh is constrained by limited product value addition, restricted market access, and weak community institutions. This study analyzes the optimization of community-based NTFP utilization from the perspectives of the Green Islamic Economy (GIE) and the Sustainable Development Goals (SDGs). A descriptive qualitative case study was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that NTFP optimization is driven by the synergy of community capacity building, product value addition, market access, institutional strengthening, and sustainable forest management. These findings reflect GIE principles and support the achievement of SDGs 8, 12, and 15.

Keywords: *non-timber forest products, capacity building, Green Islamic Economy, Sustainable Development Goals, community empowerment.*

ABSTRAK

Pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HHNK) di Aceh masih menghadapi kendala berupa rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya kelembagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat dalam perspektif *Green Islamic Economy* (GIE) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi HHNK dibangun melalui sinergi peningkatan kapasitas masyarakat, nilai tambah produk, akses pasar, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Temuan ini mencerminkan implementasi prinsip GIE sekaligus mendukung pencapaian SDG 8, SDG 12, dan SDG 15.

Kata Kunci: *hasil hutan non-kayu, capacity building, Green Islamic Economy, Sustainable Development Goals, pemberdayaan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan terluas di Indonesia mencapai 3,5 juta hektar.¹ Kawasan hutan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya hutan. Salah satu potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan juga ekologis adalah hasil hutan non-kayu (HHNK). Beberapa komoditas tersebut mencakup getah pinus, madu, sereh wangi, damar, jernang, akar kuning, kemiri, sagu, dan rotan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan tanpa harus melakukan penebangan pohon.² Karakteristik tersebut menjadikan HHNK sebagai salah satu instrumen yang dinilai mampu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Meskipun memiliki potensi sumber daya hutan yang besar, pengelolaan hutan di Aceh belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Pengembangan hasil hutan non-kayu (HHNK) masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya dukungan kelembagaan, yang memicu fenomena *underutilization of non-timber forest products*, yaitu belum optimalnya pemanfaatan HHNK meskipun potensinya melimpah.³ Kontradiksi ini tercermin dari tingkat kemiskinan Aceh yang mencapai 12,33% pada tahun 2025, tertinggi di Pulau sumatra, di tengah luasnya kawasan hutan dan beragamnya komoditas HHNK yang dimiliki.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya hutan dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, sekaligus menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang mampu mengintegrasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan.

Green Islamic Economy (GIE) menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan HHNK yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, GIE dipahami sebagai paradigma yang menggabungkan prinsip ekonomi Islam dengan praktik ekonomi hijau, seperti efisiensi sumber daya, rendah emisi, dan inklusivitas sosial. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan, yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Perincian Luas Hutan,” n.d., <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc4IzI=-pp-kh-003--perincian-luas-hutan.html>.

² Y Shabila, A. P., Muslih, A. M., & Abubakar, “Identifikasi Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh (Identification of Non-Timber Forest Product Commodities in Bener Meriah, Aceh) Adelin Putri Shabila 1 , Yusya Abubakar ² , Ali M. Muslih 1,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 8, no. 2 (2023): 583–89.

³ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Research, Development and Utilization Strategy of Non Timber Forest Product: Indonesia Case,” *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, n.d., <https://www.fao.org/4/XII/0446-A2.htm>.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Persentase Penduduk Miskin (P₀) Menurut Kabupaten/Kota,” n.d., <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/-sk-kk-003--persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-kabupaten-kota.html>.

selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam konteks optimalisasi HHNK, GIE tidak hanya memandang sumber daya hutan sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif dan berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GIE berpotensi mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).⁷

Prinsip-prinsip tersebut menjadi relevan dalam pengelolaan HHNK karena mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. Pengelolaan HHNK memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan, sehingga mencerminkan nilai keseimbangan dan kemaslahatan yang menjadi dasar *Green Islamic Economy*. Dalam penelitian ini, pendekatan GIE digunakan untuk menilai bagaimana pengelolaan HHNK mampu menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mengkaji peran HAkA dalam mendorong optimalisasi HHNK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa HHNK memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, penelitian Afrida, Nova Adella, dan Fatmona menunjukkan bahwa komoditas HHNK seperti getah pinus, madu, bambu, rotan, dan aren mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta menjadi sumber pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.⁸ Sementara itu, penelitian Mona dan Mustamu dan Kewilaa menegaskan bahwa pemanfaatan HHNK tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan *livelihood* masyarakat dan pengurangan kemiskinan.⁹

⁵ Mutmainah Mutmainah, Amir Hamzah, and Galuh Mustika Argarini, "Green Economy In Shariah Economics Perspective Improving Community Welfare," *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 2, no. 2 (August 17, 2023): 317–25, <https://doi.org/10.21107/aci.v2i2.265>.

⁶ Zusak Saad Zauro, Ahmmed Syibly Cívín, and Obioma Bouma, "Islamic Economics for Sustainable Development," *Seriati Ekonomisi* 1, no. 2 (2024): 53–70, <https://doi.org/10.35335/ac1n5382>.

⁷ United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," *Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016*, 2015, <https://doi.org/10.1201/b20466-7>.

⁸ Nur Afrida, Maryam Jamilah Lubis, and Romano Romano, "Efisiensi Pemasaran Getah Pinus (*Pinus Merkusii* Jungh. Et De Vriese) Sebagai Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Areal Kerja PT. Tusam Hutani Lestari, Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 9, no. 3 (2024): 438–46, <https://doi.org/10.17969/jimfp.v9i3.31142>; Nova Adella et al., "Nilai Ekonomi dan Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan Masyarakat Kampung Cikupa Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram," *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman* 1, no. 3 (2024): 40–53, <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v1i3.144>; Hasina; Fatmona, Asiah; Salatalohy, and Reyna Ashari, "Potential and Utilization of Non-Wood Forest Products (NTFP) Aren in Akelamo Village, Tidore Islands City," *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian* 8, no. 1 (2024): 72–81.

⁹ Frada Setia Mona, "Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pertama Sustainable Development Goals di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei," no. Table 10 (2024): 4–6; Sofia Mustamu and Victor Leo Nolly Kewilaa, "Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mendukung Livelihood Berkelanjutan : Studi Kasus di Desa Haruku," *Marsegu* :

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kontribusi ekonomi HHNK atau kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan secara umum. Kajian mengenai optimalisasi HHNK melalui perspektif *Green Islamic Economy* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Aceh dan peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung pengelolaan HHNK berbasis masyarakat. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian untuk memahami implementasi prinsip-prinsip GIE dalam pemanfaatan HHNK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran HAKA dalam mendukung optimalisasi HHNK berbasis masyarakat di Aceh melalui perspektif *Green Islamic Economy* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian HHNK berbasis pembangunan berkelanjutan serta memberikan pemahaman mengenai peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran HAKA dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat di Aceh berdasarkan perspektif *Green Islamic Economy* dan SDGs. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik, strategi, dan tantangan pengelolaan HHNK dalam konteks kehidupan nyata, serta sesuai digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada aspek "*bagaimana*" dan "*mengapa*" suatu fenomena terjadi.¹⁰ Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi HHNK yang besar, namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya kelembagaan, sehingga relevan untuk mengkaji optimalisasi pemanfaatan HHNK dalam perspektif *Green Islamic Economy* dan SDGs. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai HHNK, yang terdiri atas pihak HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat dampingan HAKA.¹¹ Karakteristik informan penelitian disajikan pada Tabel 1. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Instansi	Jabatan	Kriteria Pemilihan
1	JB	HAKA	Manajer Advokasi Non Litigasi	Memahami tata kelola hutan dan pendampingan masyarakat.

Jurnal Sains dan Teknologi 2, no. 1 (April 30, 2025): 44–55, <https://doi.org/10.69840/marsegu/1.2.2024.44-55>.

¹⁰ Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku," *Inersia* XVI, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>; Sarah Crowe et al., "The Case Study Approach," *BMC Medical Research Methodology*, 2011, <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>.

¹¹ Lawrence A Palinkas et al., "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research" 42, no. 5 (2016): 533–44, <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>. Purposeful.

2	AR	HAKA	Staf Community Organizer	Terlibat langsung dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
3	F	Dinas Kehutanan Aceh	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Memahami kebijakan dan pemanfaatan hasil hutan di Aceh.
4	NS	Kelompok Tani Hutan	Ketua Kelompok Tani Hutan (Masyarakat Dampingan HAKA)	Berpengalaman dalam pemanfaatan HHNK dan pendampingan HAKA.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Optimalisasi pemanfaatan HHNK dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan. Keberhasilan optimalisasi ditinjau dari perubahan yang terjadi pada kapasitas masyarakat, pengembangan produk HHNK, akses pasar, kelembagaan masyarakat, dan praktik pengelolaan sumber daya hutan. Peran HAKA dianalisis berdasarkan kontribusinya dalam pendampingan masyarakat, penguatan tata kelola sumber daya hutan, serta pengembangan pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹² Keabsahan interpretasi dibangun melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat dampingan. Hasil wawancara selanjutnya dikonfirmasi melalui dokumentasi dan publikasi kelembagaan guna meningkatkan kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum memaparkan hasil penelitian, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam beberapa tema berdasarkan indikator optimalisasi pemanfaatan HHNK yang menjadi fokus penelitian.

Tabel 2. Matriks Tematik

Tema	Subtema	Informan
Peningkatan kapasitas masyarakat	Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas	HAKA, Dinas Kehutanan, Kelompok Tani
Pengembangan nilai tambah produk	Diversifikasi produk dan pengemasan	HAKA, Kelompok Tani

¹² Matthew B. Miles; A. Michael Huberman; Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, Inc., n.d.).

Dukungan akses pasar	Promosi produk dan jejaring pemasaran	HAKA, Dinas Kehutanan, Kelompok Tani
Penguatan kelembagaan	Penguatan kelompok dan kolaborasi	HAKA, Dinas Kehutanan
Praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan	Konservasi dan tata kelola sumber daya hutan	HAKA, Dinas Kehutanan, Kelompok Tani

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil analisis data wawancara (2026).

Berdasarkan matriks tematik tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan-temuan yang diperoleh dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan. Untuk memperjelas proses pengelompokan dan interpretasi data, dilakukan proses coding terhadap hasil wawancara dari masing-masing informan.

Tabel 3. *Coding analysis*

Kode	Tema	Informan
PKM	Peningkatan kapasitas masyarakat	JB, AR, F, NS
NTP	Pengembangan nilai tambah produk	JB, AR, NS
AP	Dukungan akses pasar	AR, F, NS
KL	Penguatan kelembagaan	AR, F
KSDH	Praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan	AR, F, NS

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan hasil pengelompokan tema dan *coding analysis*, salah satu temuan utama penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan aspek yang paling dominan dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola HHNK secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan informan HAKA menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan fokus utama pendampingan dalam pengelolaan HHNK. Pendampingan dilakukan melalui skema perhutanan sosial yang diawali dengan identifikasi potensi lokal sebagai dasar penyusunan program. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, HAKA memfasilitasi pelatihan, penguatan manajemen usaha, pengelolaan kelompok, serta penyusunan *business model canvas* untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola HHNK secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan JB berikut:

"...kami mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial..." (JB).

Informan AR menambahkan bahwa seluruh bentuk pendampingan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan potensi desa. Selanjutnya AR menyatakan:

"...pendampingan diawali dengan diskusi untuk mengidentifikasi potensi lokal masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan manajemen usaha, pengelolaan kelompok, hingga business model canvas agar masyarakat mampu mandiri. Peningkatan tersebut tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat..." (AR).

Pandangan HAKA tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama informan Dinas Kehutanan Aceh yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan pengelolaan HHNK yang berkelanjutan. Informan menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas penyuluh, pelatihan kelembagaan, serta pendampingan kepada kelompok tani hutan agar mampu mengelola HHNK secara mandiri dan berkelanjutan. Informan F menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas dilakukan melalui penguatan kompetensi penyuluh, pelatihan kelembagaan, dan pendampingan kelompok masyarakat agar mampu mengelola HHNK secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan berikut:

"...kami memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyuluh serta pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kelompok agar masyarakat semakin kuat dan berkelanjutan..." (F).

Temuan yang disampaikan oleh HAKA dan Dinas Kehutanan tersebut juga tercermin pada pengalaman masyarakat dampingan HAKA. Hasil wawancara dengan informan NS menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan madu hutan, mulai dari budidaya hingga pemasaran produk. Pendampingan tersebut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola stup, proses panen, pengemasan, dan pemasaran sehingga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha madu hutan secara lebih mandiri. Informan NS menjelaskan bahwa pendampingan HAKA memberikan perubahan pada seluruh tahapan pengelolaan madu, mulai dari penyediaan stup, pelatihan budidaya, hingga pengemasan dan pemasaran produk. Hal tersebut sebagaimana disampaikan berikut:

"...kami mendapat bantuan stup, diajarkan cara merawatnya sampai panen, kemudian juga diajarkan pengemasan dan cara memasarkan produk..." (NS).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat dampingan mengenai pentingnya peningkatan kapasitas dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. HAKA berperan melalui pendampingan yang bersifat partisipatif, Dinas Kehutanan melalui penguatan penyuluh dan kelembagaan, sedangkan masyarakat merasakan secara langsung peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan madu hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat menjadi fondasi utama dalam mendukung pengelolaan HHNK yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pengembangan nilai tambah produk menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Hasil wawancara dengan informan HAKA menunjukkan bahwa pengembangan nilai tambah dilakukan melalui diversifikasi produk berdasarkan potensi lokal sehingga HHNK tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan JB dan AR berikut:

"...di Aceh Barat Daya kami mendorong masyarakat mengolah kemiri menjadi produk turunan berupa minyak kemiri, sedangkan di Singkil tanaman rumbia dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti batangnya diolah menjadi sagu dan daunnya dijadikan kerajinan..." (JB).

"...kami mendorong masyarakat memanfaatkan HHNK di sekitar mereka menjadi produk turunan, misalnya pisang diolah menjadi tepung pisang dan singkong menjadi tepung singkong sehingga memiliki nilai tambah dan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah..." (AR).

Temuan tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat dampingan HAKA. Hasil wawancara dengan informan NS menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya meningkatkan kualitas produk madu, tetapi juga mendorong perbaikan pada aspek pengemasan dan identitas produk sehingga lebih layak dipasarkan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nilai tambah tidak hanya dilakukan melalui proses pengolahan produk, tetapi juga melalui inovasi kemasan dan strategi pemasaran.

"...setelah mendapat pendampingan dari HAKA, kami tidak lagi menggunakan botol kaca bekas, tetapi diarahkan menggunakan botol plastik dengan berbagai ukuran, mulai dari 100 ml, 250 ml, hingga 1 liter..." (NS). Lanjutnya, "...HAKA juga membantu membuat logo dan stiker pada kemasan sehingga produk kami lebih menarik dan lebih mudah dikenal masyarakat..." (NS).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan nilai tambah produk menjadi salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan HHNK yang diwujudkan melalui sinergi antara pendampingan HAKA dan partisipasi masyarakat. HAKA tidak hanya mendorong masyarakat menghasilkan produk turunan berdasarkan potensi lokal, tetapi juga memperkuat aspek pengemasan dan identitas produk sebagai bagian dari peningkatan nilai ekonomi HHNK. Di sisi lain, masyarakat merasakan bahwa pendampingan tersebut menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas produk yang dipasarkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan nilai tambah tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan daya saing produk HHNK.

Selain pengembangan nilai tambah produk, hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan akses pasar menjadi aspek penting dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. Informan AR menjelaskan bahwa HAKA berperan sebagai fasilitator yang membuka akses pasar melalui perluasan jejaring pemasaran, promosi produk pada berbagai kegiatan pameran, serta pendampingan strategi

pemasaran agar masyarakat mampu memasarkan produknya secara mandiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan AR berikut:

"...HAKA tidak memasarkan produk masyarakat secara langsung, tetapi membuka akses pasar melalui jaringan yang dimiliki. Produk masyarakat pernah dipromosikan pada berbagai pameran, termasuk di Singapura dan beberapa kegiatan di dalam negeri. Setelah pendampingan, masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas dan didorong agar mampu memasarkan produknya secara mandiri..." (AR).

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama informan Dinas Kehutanan Aceh yang menunjukkan bahwa dukungan akses pasar juga menjadi bagian dari upaya pengembangan HHNK. Peran yang dilakukan tidak hanya memperluas jejaring pemasaran, tetapi juga memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha HHNK dengan calon pembeli maupun investor serta mempromosikan produk masyarakat melalui berbagai kegiatan pameran. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan F berikut:

"...kami mempertemukan pelaku usaha HHNK dengan pasar maupun investor, serta membantu mempromosikan berbagai produk HHNK melalui kegiatan expo yang diselenggarakan di berbagai kesempatan..." (F).

Temuan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dampingan HAKA. Informan NS menjelaskan bahwa selain memperkenalkan produk melalui berbagai kegiatan pameran, HAKA juga memberikan pendampingan pemasaran digital melalui media sosial sehingga jangkauan pemasaran produk madu menjadi lebih luas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan berikut:

"...selain produk kami diperkenalkan pada berbagai acara, baik di dalam maupun luar negeri, HAKA juga mengajarkan kami cara mempromosikan produk melalui WhatsApp dan Instagram sehingga produk kami lebih dikenal dan dapat dibeli tidak hanya oleh masyarakat sekitar, tetapi juga oleh konsumen dari luar daerah..." (NS).

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan akses pasar dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. HAKA berperan membuka jaringan pemasaran melalui promosi produk dan pendampingan pemasaran digital, sedangkan Dinas Kehutanan memperkuat akses tersebut melalui fasilitasi kemitraan dengan pasar, investor, dan kegiatan pameran. Dari perspektif masyarakat, berbagai bentuk pendampingan tersebut memperluas jangkauan pemasaran produk sehingga tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan akses pasar memerlukan sinergi antara pendampingan kelembagaan, dukungan pemerintah, dan kesiapan masyarakat agar produk HHNK memiliki daya saing dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selain dukungan akses pasar, hasil wawancara menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. Informan AR menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan

melalui perubahan pola pikir masyarakat agar kelompok menjadi lebih aktif, mandiri, dan mampu mengelola HHNK secara berkelanjutan.

"...pendampingan yang kami lakukan berfokus pada perubahan pola pikir masyarakat sehingga kelompok menjadi lebih aktif, mandiri, dan memiliki kepedulian dalam mengelola hasil hutan secara berkelanjutan..." (AR).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama informan Dinas Kehutanan Aceh yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan HHNK berbasis masyarakat. Informan menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH), peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan peran kelompok agar mampu mengelola HHNK secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan F berikut:

"...kami melakukan pendampingan melalui penguatan Kelompok Tani Hutan (KTH), pembinaan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas kelompok agar mampu mengelola HHNK secara mandiri..." (F).

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa HAKA dan Dinas Kehutanan Aceh memiliki pandangan yang saling melengkapi mengenai penguatan kelembagaan dalam pengelolaan HHNK. HAKA menekankan penguatan kelembagaan melalui proses pendampingan yang mendorong perubahan pola pikir dan kemandirian kelompok masyarakat, sedangkan Dinas Kehutanan berperan memperkuat kelembagaan melalui pembinaan organisasi dan peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan optimalisasi pemanfaatan HHNK tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kelembagaan masyarakat yang mampu menjalankan fungsi koordinasi, pengelolaan, dan keberlanjutan program secara berkelanjutan.

Selain penguatan kelembagaan, hasil wawancara dengan informan HAKA menunjukkan bahwa praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan menjadi bagian penting dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. Pendampingan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga pada penerapan praktik pengelolaan yang menjaga kelestarian sumber daya hutan melalui pemanfaatan secara bijaksana, perlindungan habitat, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan AR berikut:

"...kami selalu menekankan agar pemanfaatan HHNK dilakukan tanpa merusak sumber daya hutan. Masyarakat didorong menjaga hutan, habitat, serta memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan agar tetap dapat dimanfaatkan pada masa mendatang..." (AR).

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama informan Dinas Kehutanan Aceh yang menunjukkan bahwa praktik pengelolaan HHNK yang berkelanjutan tidak hanya diwujudkan melalui pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana, tetapi juga melalui pembinaan, pengawasan, dan penerapan aturan

pengelolaan hutan. Informan menjelaskan bahwa keberlanjutan sumber daya hutan dijaga melalui penerapan teknik pemanenan yang tidak merusak, pengawasan kawasan hutan, serta kewajiban melakukan penanaman kembali pada lahan yang kosong sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan F berikut:

"...pemanfaatan HHNK harus dilakukan melalui teknik pemanenan yang tidak merusak, pengawasan kawasan hutan oleh PAMHUT, serta penanaman kembali pada lahan kosong agar sumber daya hutan tetap lestari..." (F).

Temuan tersebut juga tercermin pada pengalaman masyarakat dampingan HAKA dalam menerapkan praktik pengelolaan HHNK yang berkelanjutan. Hasil wawancara dengan informan NS menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan teknik pemanenan yang memperhatikan kelestarian sumber daya hutan, seperti melakukan pemanenan secara selektif, menjaga kondisi sarang lebah, serta menghindari praktik yang dapat merusak habitat. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan HHNK tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan NS berikut:

"...kami memanen madu hanya ketika sekitar 80% sarang sudah tertutup lilin dan siap dipanen. Saat memanen kami juga berusaha tidak merusak bagian lain dari sarang agar lebah tetap bisa berkembang..." (NS).

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa adanya kesamaan pandangan antara HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat mengenai pentingnya praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK. HAKA berperan membangun kesadaran masyarakat melalui pendampingan mengenai pemanfaatan HHNK yang bertanggung jawab, sedangkan Dinas Kehutanan memperkuat praktik tersebut melalui pembinaan, pengawasan, dan penerapan aturan pengelolaan hutan. Di sisi lain, masyarakat telah menerapkan praktik pemanenan yang memperhatikan kelestarian habitat sehingga pemanfaatan HHNK tidak mengganggu keberlangsungan sumber daya hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pemanfaatan HHNK tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga oleh sinergi antara pendampingan, pembinaan, dan penerapan praktik pengelolaan yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat di Aceh merupakan proses yang dibangun melalui keterkaitan lima aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan antara HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat bahwa keberhasilan pengelolaan HHNK tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya hutan, tetapi juga oleh sinergi

pendampingan, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses pendampingan yang terintegrasi menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan HHNK sebagai sumber penghidupan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Secara konseptual, temuan penelitian ini sejalan dengan teori *capacity building* yang memandang peningkatan kapasitas sebagai proses penguatan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan serta konteks lokal. Dalam perspektif ini, peningkatan kapasitas tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pelatihan, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang mendorong masyarakat mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.¹³ Konsep tersebut tercermin dalam hasil penelitian, di mana pendampingan HAKA diawali dengan identifikasi potensi lokal dan diskusi bersama masyarakat sebelum pelatihan diberikan. Pola pendampingan tersebut juga selaras dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis HHNK yang telah dilaksanakan HAKA di Aceh, yang secara konsisten diawali dengan identifikasi potensi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, dan pendampingan pengembangan usaha sesuai karakteristik wilayah.¹⁴ Pendekatan yang bersifat bertahap dan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan HHNK, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, serta perubahan pola pikir masyarakat menuju pengelolaan sumber daya hutan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Afrida, Nova Adella, dan Fatmona yang menunjukkan bahwa pemanfaatan HHNK mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan berbagai komoditas hasil hutan non-kayu.¹⁵ Kesamaan tersebut menegaskan bahwa HHNK memiliki potensi yang besar sebagai sumber penghidupan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Namun, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan komoditas HHNK, tetapi juga oleh proses pendampingan yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian, berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada kontribusi ekonomi HHNK, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi

¹³ Sonja Klinsky and Ambuj D Sagar, "The Why , What and How of Capacity Building : Some Explorations" 3062 (2022), <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2065059>.

¹⁴ HAKA, "Pelatihan Pembuatan Kerupuk dari Tepung Sagu," 2024, <https://haka.or.id/detail-events/memberdayakan-kelompok-perempuan-nelayan-teluk-rumbia-melalui-pelatihan-pengolahan-produk-turunan-sagu/>; HAKA, "Penguatan Masyarakat Desa Seumanah Jaya Melalui Budidaya Lebah Kelulut," 2024, <https://haka.or.id/detail-events/penguatan-masyarakat-desa-seumanah-jaya-melalui-budidaya-lebah-kelulut/>.

¹⁵ Afrida, Lubis, and Romano, "Efisiensi Pemasaran Getah Pinus (Pinus Merkusii Jungh. Et De Vriese) Sebagai Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Areal Kerja PT. Tusam Hutani Lestari, Kabupaten Aceh Tengah"; Nova Adella et al., "Nilai Ekonomi Dan Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan Masyarakat Kampung Cikupa Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram"; Fatmona, Salatalohy, and Ashari, "*Potential And Utilization Of Non-Wood Forest Products (NTFP) Aren In Akelamo Village, Tidore Islands City.*"

HHNK merupakan hasil sinergi antara organisasi pendamping (HAKA), pemerintah melalui Dinas Kehutanan Aceh, dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi tersebut membentuk mekanisme pemberdayaan yang saling melengkapi sehingga optimalisasi HHNK tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, kelembagaan, akses pasar, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan HHNK tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *Green Islamic Economy* (GIE). Dalam perspektif GIE, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan yang berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta keberlanjutan sumber daya.¹⁶ Prinsip *al-'adl* tercermin melalui pendampingan yang dilakukan HAKA bersama Dinas Kehutanan Aceh yang memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha berbasis HHNK, memperoleh akses pelatihan, penguatan kelembagaan, dan perluasan jaringan pemasaran sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif. Sementara itu, prinsip *maslahah* dan keberlanjutan diwujudkan melalui praktik pengelolaan HHNK yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk dan akses pasar, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan melalui penerapan teknik pemanenan yang tidak merusak, perlindungan habitat, pengawasan kawasan hutan, serta penanaman kembali pada lahan yang telah dimanfaatkan. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan HHNK tidak hanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi ekologis hutan bagi generasi mendatang.

Implementasi prinsip-prinsip *Green Islamic Economy* dalam optimalisasi pemanfaatan HHNK tersebut juga memperlihatkan keterkaitan yang erat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dan dukungan akses pasar berkontribusi terhadap pencapaian SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui terciptanya peluang usaha, peningkatan produktivitas, dan penguatan sumber pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.¹⁷ Selanjutnya, pengolahan HHNK menjadi berbagai produk turunan, perbaikan kualitas kemasan, serta perluasan akses pemasaran mencerminkan implementasi SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) karena mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.¹⁸ Sementara itu, praktik pemanenan yang tidak merusak, perlindungan habitat, pengawasan kawasan hutan, serta penanaman kembali menunjukkan kontribusi terhadap SDG 15 (*Life on Land*) melalui upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan dan keberlangsungan sumber daya alam.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan HHNK tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi

¹⁶ Mutmainah, Hamzah, and Mustika Argarini, "Green Economy in Shariah Economics Perspective Improving Community Welfare"; Zauro, Cívín, and Bouma, "Islamic Economics for Sustainable Development."

¹⁷ United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development."

¹⁸ United Nations.

¹⁹ United Nations.

masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian mengenai optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat dengan menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau pemanfaatan komoditas hasil hutan semata, tetapi merupakan hasil integrasi antara *capacity building*, prinsip-prinsip *Green Islamic Economy*, dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang kolaboratif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan membentuk suatu mekanisme pemberdayaan yang berlangsung secara terpadu melalui sinergi antara organisasi nonpemerintah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengelolaan HHNK dengan menawarkan suatu kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan secara utuh, sehingga optimalisasi pemanfaatan HHNK dipahami tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai proses membangun kapasitas masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan HHNK berbasis masyarakat merupakan suatu proses yang bersifat terpadu dan saling berkaitan, di mana keberhasilannya tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya hutan, tetapi juga pada efektivitas pendampingan, dukungan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi tersebut membentuk mekanisme pengelolaan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sehingga pemanfaatan HHNK tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif menjadi elemen penting dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan HHNK yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HHNK) di Aceh tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya hutan yang tersedia, tetapi oleh proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara HAKA, Dinas Kehutanan Aceh, dan masyarakat sebagai pelaku utama. Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui keterkaitan lima aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk, dukungan akses pasar, penguatan kelembagaan, serta penerapan praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan. Kelima aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk mekanisme pengelolaan HHNK yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem hutan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola HHNK, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas akses ekonomi, serta

membangun kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan optimalisasi HHNK tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan produksi atau pemanfaatan komoditas, melainkan memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara organisasi pendamping, pemerintah, dan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian mengenai optimalisasi pemanfaatan HHNK dengan mengintegrasikan perspektif *capacity building*, *Green Islamic Economy*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam satu kerangka analisis. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi HHNK tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik maupun praktis sebagai rujukan bagi pemerintah, organisasi pendamping, dan masyarakat dalam merancang strategi pengelolaan HHNK yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrida, Nur, Maryam Jamilah Lubis, and Romano Romano. "Efisiensi Pemasaran Getah Pinus (*Pinus Merkusii* Jungh. Et De Vriese) Sebagai Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Areal Kerja PT. Tusam Hutani Lestari, Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 9, no. 3 (2024): 438–46. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v9i3.31142>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. "Perincian Luas Hutan," n.d. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc4IzI=/--pp-kh-003--perincian-luas-hutan.html>.
- . "Persentase Penduduk Miskin (P_0) Menurut Kabupaten/Kota," n.d. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/-sk-kk-003--persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-kabupaten-kota.html>.
- Crowe, Sarah, Kathrin Cresswell, Ann Robertson, Guro Huby, Anthony Avery, and Aziz Sheikh. "The Case Study Approach." *BMC Medical Research Methodology*, 2011. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>.
- Fatmona, Hasina; Asiah; Salatalohy, and Reyna Ashari. "Potential And Utilization of Non-Wood Forest Products (NTFP) Aren In Akelamo Village, Tidore Islands City." *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Dan Pertanian* 8, no. 1 (2024): 72–81.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). "Research, Development and Utilization Strategy of Non Timber Forest Product: Indonesia Case." *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, n.d. <https://www.fao.org/4/XII/0446-A2.htm>.
- Frada Setia Mona. "Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pertama Sustainable Development Goals di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei," no. Table 10 (2024): 4–6.
- HAKA. "Pelatihan Pembuatan Kerupuk dari Tepung Sagu," 2024. <https://haka.or.id/detail-events/memberdayakan-kelompok-perempuan-nelayan-teluk-rumbia-melalui-pelatihan-pengolahan-produk-turunan-sagu/>.
- . "Penguatan Masyarakat Desa Seumanah Jaya Melalui Budidaya Lebah Kelulut," 2024. <https://haka.or.id/detail-events/penguatan-masyarakat-desa->

- seumanah-jaya-melalui-budidaya-lebah-kelulut/.
- Klinsky, Sonja, and Ambuj D Sagar. "The Why , What and How of Capacity Building : Some Explorations" 3062 (2022). <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2065059>.
- Matthew B. Miles; A. Michael Huberman; Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc., n.d.
- Mustamu, Sofia, and Victor Leo Nolly Kewilaa. "Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mendukung Livelihood Berkelanjutan : Studi Kasus Di Desa Haruku." *Marsegu: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (April 30, 2025): 44–55. <https://doi.org/10.69840/marsegu/1.2.2024.44-55>.
- Mutmainah, Mutmainah, Amir Hamzah, and Galuh Mustika Argarini. "Green Economy In Shariah Economics Perspective Improving Community Welfare." *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 2, no. 2 (August 17, 2023): 317–25. <https://doi.org/10.21107/aci.v2i2.265>.
- Nova Adella, Raudhah Shalsabillah, Mellani Mellani, Intan Saputri, Okta Refki, Firli Fachrezi Yansyah, and Alief Rakhman Setyanto. "Nilai Ekonomi dan Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan Masyarakat Kampung Cikupa Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram." *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 1, no. 3 (2024): 40–53. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v1i3.144>.
- Nur'aini, Ratna Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku." *Inersia* XVI, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>.
- Palinkas, Lawrence A, Sarah M Horwitz, Carla A Green, Jennifer P Wisdom, Naihua Duan, Kimberly Hoagwood, Los Angeles, and Kaiser Permanente Northwest. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research" 42, no. 5 (2016): 533–44. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>.
- Shabila, A. P., Muslih, A. M., & Abubakar, Y. "Identifikasi Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh (Identification of Non-Timber Forest Product Commodities in Bener Meriah, Aceh) Adelin Putri Shabila 1 , Yusya Abubakar 2 , Ali M. Muslih 1." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 8, no. 2 (2023): 583–89.
- United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." *Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016*, 2015. <https://doi.org/10.1201/b20466-7>.
- Zauro, Zusak Saad, Ahmmed Syibly Cívín, and Obioma Bouma. "Islamic Economics for Sustainable Development." *Seriat Ekonomisi* 1, no. 2 (2024): 53–70. <https://doi.org/10.35335/ac1n5382>.